

II

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

DPR Dukung Penerapan Pajak Tambahan Migas

Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan soal pajak ini sebelum kenaikan BBM.

JAKARTA — Komisi VII DPR mendukung rencana pemerintah menerapkan pajak keuntungan tambahan (*windfall profit tax*) terhadap para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas yang menikmati penghasilan berlipat menyusul tingginya harga minyak.

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, pemerintah seharusnya sudah sejak awal memberlakukan *windfall profit tax*. "Sebelum memutuskan kenaikan harga BBM pemerintah harusnya melakukan langkah ini dulu," ujarnya kepada *Republika*, Kamis (12/6).

Dalam pertemuannya dengan perusahaan-perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), Rabu (11/6), Presiden SBY meminta agar mereka membagi derita akibat kenaikan harga minyak yang melambung ini.

Pemerintah, menurutnya, harus membuat kebijakan di sektor energi yang lebih rinci mulai dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemerintah harus segera menyusun *blue print* (cetak biru) kebijakan *cost recovery*.

Sedangkan di sektor hilir, lanjut anggota DPR dari Fraksi PAN, besaran pungutan ekspor (PE) komoditi migas harus dinaikkan. Disamping itu, kewajiban pasok ke dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO) harus dipertegas. "Jangan DMO-nya *dikecil-kecilin*."

Selain itu, tambah Tjatur, berbagai kebijakan insentif fiskal di sektor migas yang saat ini diberlakukan pemerintah ditinjau kembali. "Yang terpenting antara eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bersatu," tandasnya.

Dicontohkannya Pajak Penghasilan (PPH). Dengan menaikkan PPh migas sebesar 25 persen, menurutnya, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan sekitar Rp 7 triliun.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi VII Airlangga Hartarto. Da-

si VII DPR telah meminta pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. "Kami telah meminta pemerintah menerapkan pajak progresif sebagai kompensasi kenaikan harga minyak," katanya.

Menurutnya, pemerintah dapat menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kebijakan baru tersebut. "Aturan perpajakan di bidang migas sudah tercantum dalam kontrak kerja sama, sehingga format yang memungkinkan mengatur kebijakan baru itu adalah berbentuk perpres," ujar dia.

Sementara anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, meski terlambat, namun dirinya mendukung rencana pemerintah tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah telah menerapkan kebijakan tersebut sejak 2005 saat harga minyak mulai merangkak naik.

"Pemerintah lamban mengambil kebijakan ini. Kenaikan harga minyak dunia sudah sedemikian nyata sejak 2005, tapi baru sekarang pemerintah mulai melangkah," katanya.

Menurut Alvin, negara sudah terlanjur menderita kerugian akibat kehilangan potensi penerimaan yang besar karena pajak tambahan tersebut tidak diterapkan sejak dulu. Seandainya langkah tersebut diambil sejak akhir 2007, sambungannya, maka bisa saja kenaikan harga BBM masih bisa dihindari.

Namun, lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan jaminan kerindungan pajak kepada kontraktor jika dikemudian hari harga minyak turun. Ia juga berharap, selain pajak tambahan, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi migas khususnya lapangan-lapangan yang sudah tua. "Jangan terlalu fokus memungut pajak tambahan, namun malah membuat kontraktor tidak semangat naikkan produksi minyak," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Suyitno Padmosukismo enggan memberikan komentarnya. "Saya belum tahu rencana pemerintah menaikkan pajak pada KPS, apakah dengan pengenaan pajak baru atau merubah besaran atas pajak yang sudah ada," ujarnya. ■ dia

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 79

TAHUN 2008

'Pajak *windfall profit* tidak akan digunakan

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan mekanisme berbagi beban antara pemerintah dan kontraktor migas untuk mengamankan APBN tidak akan melalui kenaikan pajak atau penerapan pajak *windfall profit*.

"Nantinya, *sharing the pain* di satu sisi tidak banyak merugikan perusahaan minyak, tetapi perekonomian kita, terutama APBN kita terbantu. Saya tidak mengatakan *sharing the pain* itu harus menaikkan pajak. Siapa bilang harus menaikkan pajak," katanya kemarin.

Menurut dia, pertemuan tiga pihak antara Menkeu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Dirjen Pajak hanya untuk membuat penjabaran konkret mengenai sikap berbagi beban itu, yang tidak dijabarkannya secara rinci.

"Dirjen pajak kami ikut ser-takan karena ini terkait dengan mengotak-atik penerimaan negara yang terdiri dua bagian, yaitu pajak dan PNBP."

Namun, Purnomo mengaku telah mengantongi mekanisme penambahan penerimaan dari sektor migas yang akan dimasukkan dalam APBN 2009 itu. Mekanisme itu, akan bergantung pada besaran kebutuhan APBN nanti.

"Misalnya bagaimana kalau kebutuhan tambahan APBN Rp20 triliun. Lalu bagaimana kalau Rp25 triliun, kami sudah mengantonginya," tuturnya.

Purnomo memastikan langkah-langkah yang akan diputuskan bersama itu masih mempertimbangkan aturan-aturan yang ada. "Tidak karena *sharing the pain* kemudian kita melakukan langkah yang tidak sesuai dengan aturan."

Sebelumnya, Presiden Su-

silo Bambang Yudhoyono meminta para perusahaan hulu migas untuk berbagi beban untuk menekan defisit APBN akibat lonjakan subsidi BBM dan mengamankan target produksi minyak yang telah ditetapkan di APBN-P.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terkait dengan kegiatan hulu migas dan sekitar 50 pimpinan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) bidang hulu migas.

Selain permintaan untuk berbagi beban, Presiden juga menekankan kembali pentingnya pemenuhan target produksi minyak yang sudah ditetapkan di dalam APBN-P, yaitu sebesar 977.000 barel per hari. Ke depannya, Presiden meminta agar perusahaan hulu migas dapat terus meningkatkan produksi.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

'Prediksi konsumsi BBM tak realistis'

Oleh AHMAD MUHIBBUDDIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kadin Indonesia mencurigai perkiraan lonjakan konsumsi BBM 2008 sebagai angka rekayasa, terkesan dibuat-buat, dan kurang masuk akal karena tren konsumsi pascapemberlakuan kenaikan harga masih kurang dari satu bulan.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, menilai terlalu dini memunculkan perkiraan tentang terjadinya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi. Ini dikhawatirkan akan mendorong publik untuk berspekulasi sehingga ada kenaikan harga kedua.

"Publik akan curiga bahwa perkiraan itu buru-buru dimunculkan untuk memperkuat alasan pemerintah menaikkan harga BBM berikutnya," katanya kemarin.

Dia menegaskan kecenderungan konsumsi pada rentang waktu yang singkat ini belum layak dijadikan data yang objektif sebagai dasar sebuah

perkiraan atau tren.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu sebelumnya memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi 2008 akan membengkak dari target 35,5 juta kl menjadi 42 juta kl terutama karena volume konsumsi premium yang meningkat. Akibatnya, subsidi BBM 2008 akan mencapai Rp198 triliun, meskipun harga sudah naik 28,7%.

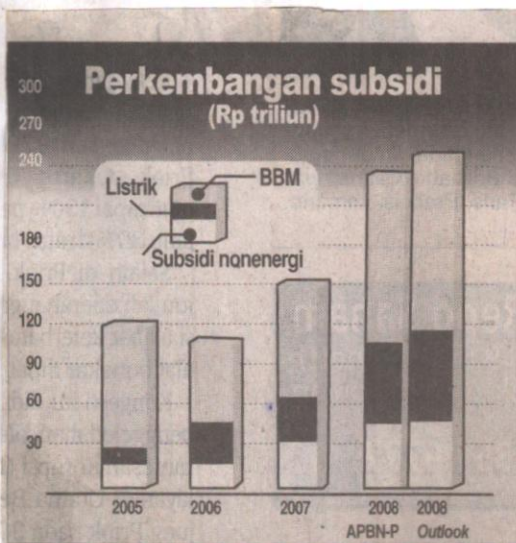
"Perkiraan itu memperlihatkan ada peningkatan konsumsi BBM bersubsidi 6,5 juta kl. Siapa yang mengonsumi peningkatan sebanyak itu? Sebab, di masyarakat, tren yang terlihat justru sebaliknya," jelas Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyaning Indrawati memperkirakan subsidi energi tahun depan diperkirakan melambung menjadi Rp291,2 triliun karena pembengkakan volume konsumsi BBM di dalam negeri dan tekanan harga minyak dunia.

Dia mengatakan RAPBN 2009 masih menghadapi risiko terkait dengan harga minyak dunia dan konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri. Pemerintah memperkirakan volume konsumsi BBM termasuk yang dikonversi LPG akan mencapai 42,8 juta kiloliter.

"Ini sangat tinggi tidak ada kebijakan apa pun yang bisa mengurangi volume konsumsi BBM. Karena itu kami ajukan beberapa perubahan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal," katanya, Rabu, dalam rapat dengan Panitia Anggaran DPR dalam rangka me-

35



Sumber: Depkeu BISNIS/DENNY IRAWAN

nindaklanjuti pembahasan asumsi makro dan energi di Komisi VII dan XII.

Premium melonjak

Menkeu memaparkan lonjakan konsumsi terbesar akan terjadi pada

premium dari 14,4 juta kiloliter menjadi 20,4 juta kiloliter dan solar dari 9,8 juta kiloliter menjadi 12,6 juta kiloliter. Minyak tanah diperkirakan turun dengan pemberlakuan konversi menjadi 5,8 juta kiloliter dari perkiraan sebelumnya 8,4 juta kiloliter.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan menggunakan basis volume konsumsi BBM bersubsidi 38,8 juta kiloliter dan konversi minyak tanah ke LPG 4 juta kiloliter sehingga konsumsi BBM harus dikenalkan.

Mekanisme yang akan ditempuh adalah penggunaan kartu kendali dan konversi LPG, kebijakan transportasi di perkotaan untuk mobil pribadi dan kebijakan fiskal terkait. Dengan pengendalian itu diharapkan subsidi dapat ditekan sekecil mungkin. (ahmad.muhibbuddin@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2008

Harga Minyak Turun di Bawah US\$ 134

LONDON – Harga minyak dunia pada perdagangan Kamis (12/6) turun hampir US\$ 3 per barrel setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) menyangkal kekurangan pasokan minyak untuk kebutuhan empat minggu mendatang. Di New York, harga minyak mentah untuk pengiriman Juli mendatang turun US\$ 2,9 menjadi US\$ 133,48 per barrel, sedangkan di London harga minyak mentah jenis *brent* turun US\$ 2,59 menjadi US\$132,43.

Sehari sebelumnya harga minyak naik lebih dari US\$ 5 per barrel setelah data pemerintah AS menunjukkan penurunan cadangan minyak

mentah untuk empat minggu ke depan. “Kemarin malam harga naik terlalu tinggi dan sekarang turun sebagai koreksi untuk jangka pendek,” ujar David Moore, analis komoditas Commonwealth Bank of Australia di Sydney seperti dikutip *Reuters*, kemarin.

Sejak awal tahun ini, harga minyak mentah dunia telah melonjak sekitar 40% hingga mencapai rekor tertinggi, US\$ 139 per barrel pekan lalu. Sejumlah analis menyatakan bahwa kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dunia akan mendorong kenaikan harga minyak lebih tinggi lagi.

Sejumlah negara produsen minyak menyangkal bahwa mereka bisa memproduksi lebih tinggi. Mereka pun menyangkal bahwa harga minyak saat ini tidak realistis dan terlalu ringgi. Pada 22 Juni mendatang, pertemuan antara produsen dan konsumen minyak akan digelar di Saudi Arabia, untuk mencari solusi atas tingginya harga minyak dunia.

Dalam pertemuan mendatang, secara bersama-sama, Saudi Arabia, Irak, dan Iran diharapkan bersedia untuk meningkatkan produksi minyaknya hingga 700 ribu barrel lebih tinggi dari rata-rata produksi Mei lalu. (nas)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

JUN 2008

BPK Siap Audit Investigatif PNBP Migas

JAKARTA (SINDO) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap melakukan audit investigatif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) tahun 2007. Namun, hal itu baru bisa dilakukan bila ada permintaan resmi dari DPR.

"Kita siap melakukan audit investigatif seandainya sudah ada permintaan dari DPR," ujar Auditor Utama BPK Syafri Adnan Baharuddin di Jakarta kemarin.

Permintaan resmi yang dimaksud ada-

lah permohonan secara tertulis dari DPR kepada BPK. Dengan adanya permintaan tertulis tersebut, legalitas BPK dalam melakukan tugasnya menjadi kuat. "Kita sudah mendengar omong-omongnya, tapi kita belum menerima permintaan tertulisnya," kata Syafri.

Sebelumnya, ungkap Syafri, Komisi XI DPR telah menemui BPK. Dalam pertemuan tersebut, DPR melakukan konsultasi terkait penerimaan migas negara. Anggota Komisi XI DPR Dradjad HWibowo mengatakan, secepatnya surat permintaan tersebut akan dikirim ke BPK. "Setahu saya, surat itu sedang dalam proses," ujarnya.

Dradjad mengatakan, pemeriksaan oleh BPK mencakup kinerja dan investigasi terhadap laporan keuangan rekening penerimaan migas.

Menurut dia, hingga saat ini akurasi dan akuntabilitas

jumlah produksi minyak mentah siap jual (*lifting*) tidak pernah diketahui pasti oleh DPR, apalagi oleh publik. Pasalnya, untuk menghitung kapasitas minyak bumi yang dihasilkan dari perut bumi Indonesia dipakai alat hitung yang dipasang di tempat pengeboran minyak. Namun, alat ini tidak menjamin angka *lifting* merupakan realisasi seperti diklaim pemerintah.

Dradjad menambahkan, audit investigasi juga diperlukan untuk mengungkap kejelasan penerimaan PNBP yang tidak dapat di-

pertanggungjawabkan dari sisi laporan keuangan. Berdasarkan laporan audit tahun 2004, setiap tahun terdapat sekitar 10% dana PNBP migas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut laporan BPK tahun 2003, penerimaan PNBP SDA sebesar Rp61,56 triliun dengan Rp5 triliun di antaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan dananya.

Jumlah kebocoran diperkirakan bertambah, seiring peningkatan realisasi PNBP tahun 2004, 2005, dan 2006 yang masing-masing Rp85,26 triliun, Rp103,84 triliun, dan Rp165,46 triliun. Tahun 2007, BPK melaporkan realisasi PNBP migas mencapai Rp132,8 triliun, lebih tinggi dari APBN Perubahan 2007, sebesar Rp115 triliun. Hal ini mengakibatkan realisasi PNBP setelah diaudit mengalami selisih lebih Rp16,9 triliun dari APBN Perubahan 2007.

(zaenal muttaqin)

“
”
Kita sudah mendengar omong-omongnya, tapi kita belum menerima permintaan tertulisnya.

SYAFRI ADNAN
Auditor Utama BPK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

DPR Bahas Pajak Kontraktor Migas

Asosiasi Perminyakan Tunggu Kejelasan

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Khusus Paket Rancangan Undang-Undang Perpajakan DPR telah menjadwalkan pembahasan tentang pajak atas penghasilan tambahan akibat kenaikan harga minyak mentah atau *windfall profit* yang diterima oleh semua kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS migas.

Ini ditekankan karena wacana tentang aspek keadilan dan upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor migas semakin menguat.

"Kami belum sampai pada pembahasan daftar isian masalah itu (soal opsi pajak *windfall profit*) dalam pembicaraan RUU Pajak Penghasilan (PPh). Namun, dalam pembicaraan anggota Panitia Kerja RUU PPh, ada wacana mengangkat masalah pajak *windfall profit*," ujar Ketua Panitia Khusus Paket RUU Perpajakan DPR Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Kamis (12/6).

Menurut Melchias, pembahasan pajak *windfall profit* itu akan difokuskan pada penghasilan atas tambang batu bara dan migas. "Sementara ini, hal itu masih sebatas pembicaraan di luar forum rapat," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (11/6), meminta kontraktor migas untuk ikut berbagi dengan pemerintah soal dampak kenaikan harga minyak terhadap subsidi. Pemerintah

akan mengambil beberapa kebijakan terhadap mereka untuk mengurangi tekanan APBN. Bentuk berbagai dampak itu akan dijabarkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak.

Ketegasan pemerintah

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengemukakan, pemerintah lebih baik memilih menerapkan pajak *windfall profit*. Ia menilai, sebagai pemilik sumber daya energi, negara memiliki hak sepenuhnya untuk mendapat hasil yang paling optimal.

"Sekarang tinggal ketegasan dari pemerintah saja. Menerapkan *windfall profit tax* melalui undang-undang itu lebih efektif. Kalau melalui mekanisme kontrak, harus ada kesepakatan dengan kontraktor migas," ujarnya.

Penerimaan pajak migas selama Januari-Mei 2008 mencapai Rp 27,8 triliun atau meningkat 66,8 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2007, yakni

Rp 16,7 triliun. Pajak migas terdiri atas PPh yang diterima KKKS migas.

Pri Agung menyesalkan pemerintah yang terkesan lebih dulu meminta kontraktor berbagi beban padahal konsep belum jelas.

Untuk mendorong upaya produksi migas, pemerintah sudah membebaskan bea masuk alat-alat pengeboran KKKS awal Januari lalu. Dalam pertemuan dengan presiden, KKKS kembali meminta pemerintah memberi kompensasi, yaitu untuk aturan lelang pengadaan barang.

Wakil Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia Ron Aston menyatakan, para kontraktor juga mencatat keinginan presiden. Namun, ia mengatakan, asosiasi sulit memberi tanggapan karena bentuk berbagai rasa itu belum jelas. "Yang kami tangkap, Presiden sangat mendorong semua pihak bekerja sama mencapai hasil yang terbaik," kata Ron.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yugiantoro mengatakan, penambahan penerimaan negara dari migas bisa didapat lewat pajak dan bukan pajak.

"Ini yang akan diutak-atik. Pemerintah akan ikut aturan. Di satu sisi perusahaan migas tidak banyak dirugikan, sementara di sisi lain perekonomian negara terbantu," kata Purnomo.

(OIN/DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Kenaikan Subsidi BBM untuk Redam Inflasi

JAKARTA (SINDO) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sengaja memperbesar volume premium dan solar bersubsidi pada 2009 untuk menjaga agar tekanan inflasi tidak begitu tinggi. Pasalnya, pembatasan terlalu ketat konsumsi pada dua jenis bahan bakar itu bisa menimbulkan ongkos ekonomi yang besar.

"Bicara tentang penghematan, entah itu dalam bentuk premium dan solar, tentu kita harus melihat apakah ongkosnya kemudian menghambat kegiatan ekonomi, munculnya inflasi, dan lain-lain," ujarnya di Jakarta kemarin.

Namun, kata Menkeu, bila tanpa pembatasan memakai kartu pintar (*smart card*), konsumsi BBM bersubsidi bisa lebih tinggi dari angka rekomendasi Komisi VI DPR sebesar 42,8 juta kiloliter (kl). Bila itu terjadi, estimasi pagu anggaran subsidi BBM bisa bertambah di atas Rp155,7 triliun.

Menurut dia, hanya minyak tanah yang diproyeksikan tahun depan dapat dihemat dengan mudah karena target konversi ke gas elpiji mencapai 4 juta kl, naik 100% dari target 2008. Penetapan volume premium dan solar bersubsidi yang lebih tinggi dibandingkan tahun ini karena harga minyak Indonesia

(Indonesia crude price/ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD120 per barel.

Estimasi volume BBM tahun depan sebesar 42,8 juta kl terdiri atas premium 20,4 juta kl (naik 3,5 juta kl dari 2008), minyak tanah 5,8 juta kl (lebih rendah 1,7 juta kl), solar 13,6 juta kl (lebih banyak 2,6 juta kl), dan konversi elpiji setara dengan 4 juta kl.

Menurut Menkeu, angka tersebut baru proyeksi dan akan dibahas lebih detail pada tingkat panitia kerja (panja) di Panitia Anggaran DPR. Pemerintah berupaya menekan tingkat konsumsi tanpa mengorbankan potensi ekonomi dan memicu inflasi.

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan masih terlalu dini bagi pemerintah untuk memperkirakan konsumsi BBM bersubsidi tahun 2009. Sebab, bisa saja konsumsi meleset lebih rendah dari yang diperkirakan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah melihat terlebih dulu kecenderungan konsumsi dalam satu hingga dua bulan ke depan. Selain itu, kata Bambang, perkiraan juga seharusnya didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi 2009.

(muhammad
ma'ruf/zaenal muttaqin)

39

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Pertamina Akan Hitung Ulang Minyak yang Belum Terjual

PT Pertamina (Persero) akan menghitung ulang secara akurat bersama-sama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) terkait volume produksi minyak mentah Indonesia sebanyak 11 juta barel yang belum diangkut atau tersimpan di tangki penampungan.

Hal itu, terkait teguran dari BP Migas mengenai ketidakmampuan Pertamina menjual minyak mentah milik pemerintah. "Pertamina selaku pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjual minyak mentah tersebut selalu mengikuti ketentuan yang ditetapkan BP Migas," kata Vice President Komunikasi Pertamina Wisnuntoro dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/6).

Wisnuntoro menjelaskan, BP Migas selama ini selalu menggelar rapat rutin untuk mengkoordinasikan rencana pengapalan minyak mentah Indonesia yang akan diangkut serta dihadiri selain oleh Pertamina juga seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berjumlah 26 buah saat ini.

Mengenai jumlah produksi minyak mentah Indonesia sebanyak 11 juta barel yang belum diangkut seperti yang disampaikan BP Migas, lanjut Wisnuntoro, maka Pertamina akan melakukan klarifikasi dan penghitungan ulang secara akurat bersama-sama dengan BP Migas.

Pertamina yang diwakili oleh anak perusahaannya, saat ini merupakan salah satu pelaksana KKKS di sejumlah wilayah kerja yang dikoordinasikan dan diatur oleh BP Migas. BP Migas selaku pengawas kegiatan hulu di Indonesia telah menerapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma bisnis yang fair, dan Pertamina otomatis ikut dalam mekanisme kerja tersebut.

Sementara Kepala BP Migas R Priyono sebelumnya mengatakan, akan memberi waktu 2 minggu pada Pertamina untuk menyelesaikan lifting (penjualan) minyak hasil produksi nasional yang masih tertimbun di storage (tangki penimbunan).

Pertamina ditunjuk BP Migas sebagai penjual hasil produksi minyak mentah bagian pemerintah

Indonesia. Namun sejak 2007, proses penjualan minyak mentah yang sudah diproduksi ini tersendat. Alasannya antara lain ketidakcukupan kalap, kerusakan kapal sampai masalah cuaca.

Proses penjualan minyak (lifting) yang tidak maksimal ini membuat penerimaan negara dari sektor migas juga tidak optimal, meskipun produksi minyak sudah meningkat.

Minyak mentah hasil produksi yang tertumpuk di storage sejak 2007 sekitar 11 juta barel. Memang tidak semua minyak harus dijual karena ada yang diperlukan sebagai stok nasional.

Jika Pertamina tidak bisa menyelesaikan tugasnya dalam dua minggu, BP Migas akan menunjuk pihak lain sebagai penjual minyak bagian pemerintah. "Pihak lain itu akan ditenderkan," ujarnya.

Dia juga mengatakan, produksi minyak sudah meningkat hingga bulan Mei 2008 mencapai 990.000 barel per hari. "Namun, lifting bulan lalu hanya tercatat 900.000 barel per hari," ujarnya. (A Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

Peran Swasta di Bisnis Elpiji Makin Terbuka Luas

Peluang kalangan swasta dipastikan terbuka luas di bisnis gas elpiji (liquified petroleum gas/LPG) kemasan 12 kilogram (kg). Hal itu, seiring dengan semakin meningkatnya permintaan LPG kemasan 12 kg untuk kalangan rumah tangga di Tanah Air.

Untuk pemenuhan kebutuhan elpiji masyarakat luas, Pertamina juga telah menggelontorkan elpiji di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selama satu pekan lalu. Tercatat, selama sepekan ini, pihaknya sudah memasok elpiji ke masyarakat sebanyak 3.000 ton per hari.

"Kami sudah gelontor elpiji habis-habisan. Setiap hari, tidak kurang 3.000 ton selama seminggu ini," katanya. Hal itu juga menanggapi masih adanya kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Kelangkaan elpiji sebelumnya sempat terjadi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jati Makmur, Bekasi, Serpong dan Banten.

Menurut Faisal, pasokan sebesar 3.000 ton elpiji per hari tersebut

Pihak PT Pertamina (Persero) menyambut baik pihak swasta yang ingin bergelut di bisnis gas LPG sehingga bisa membantu menjaga kelancaran pasokan dan distribusi elpiji tersebut.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal menjelaskan, setelah pemerintah mengizinkan elpiji 3 kg untuk menggantikan minyak tanah mendorong permintaan elpiji belakangan ini terus meningkat.

"Sebenarnya Pertamina sanggup, tetapi karena *demand* meningkat ditandai beralihnya konsumen dari yang semula pakai 3 kg jadi ke 12 kg dan 50 kg juga beralih ke 12 kg. Jadi perlu keterlibatan swasta," kata Faisal di Jakarta, baru-baru ini.

41

sudah melebihi kebutuhan di wilayah Jawa bagian barat yang normalnya hanya 2.700 ton per hari. "Kami juga sudah jual langsung elpiji di 43 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di Jabodetabek," katanya.

Pihaknya sudah melakukan pengecekan selama dua hari terakhir di toko-toko elpiji dan stok masih cukup. "Mestinya tidak ada kelangkaan lagi," katanya.

Meski demikian, diakuinya dengan makin banyaknya pengguna elpiji 12 kg membuat Pertamina makin merugi karena elpiji 12 kg tidak disubsidi pemerintah melainkan Pertamina secara korporat.

Sebelumnya, Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya pernah mengatakan, kerugian bisnis elpiji 12 kg tahun ini mencapai Rp 7 triliun. Melonjak 2 kali lipat dari 2007 yang sekitar Rp 3 triliun.

"Jadi 12 kg ini kalau kondisinya seperti sekarang Pertamina sulit mengembangkannya. Sudah harga tidak disubsidi, demand meningkat, sementara Pertamina infrastrukturnya terbatas. Jadi 3 kendala ini kita sulit menghadapi kenaikan permintaan 12 kg," ujar Faisal.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan tabung elpiji dalam program konversi, Pertamina telah diberikan lampu hijau untuk mengimpor tabung elpiji 3 kg sebanyak 6,5 juta unit selama tahun 2008. Untuk tahap awal, satu juta ton tabung impor siap didatangkan pada bulan Juni ini.

"Kita kan punya kuota impor 6,5 juta. Kita lihat-lihat dulu, bulan Juni ini kita mulai. Ya, awalnya satu juta dulu. Kan nggak bisa sekaligus," kata Hanung Budya.

Keseluruhan jatah impor tabung elpiji yang sebanyak 6,5 juta unit tersebut akan dilakukan secara bertahap selama tujuh bulan ke depan.

Meski begitu, Pertamina cukup selektif dalam menentukan pabrikan mana yang akan melayani kebutuhan impor tabung elpiji tersebut. Namun, sebelumnya sudah ada pilihan diantaranya perusahaan di Thailand atau China.

Kuota impor tabung elpiji sebanyak 6,5 juta unit ini merupakan bagian dari program percepatan konversi minyak tanah ke elpiji yang diharapkan rampung 2009. Untuk 2008 saja, target penerima paket konversi menjadi 20 juta kepala keluarga.

Dengan begitu, artinya tabung

yang harus disediakan Pertamina sekitar 40 juta unit. Sisa kebutuhan tabung akan dipasok dari pabrikan dalam negeri termasuk empat BUMN yang dikerahkan untuk membantu memproduksi tabung elpiji 3 kg ini.

Paket Konversi

Terkait realisasi program konversi minyak tanah di sejumlah daerah, Pertamina telah menjadwalkan pembagian paket kompor dan gas tabung hingga akhir tahun 2008 ini. Pertamina Unit Pemasaran II akan merealisasikan konversi gas tahap III sebanyak 100.000 tabung 3 kg.

"Sekarang ini untuk konversi gas elpiji tabung isi 3 kg sudah masuk tahap III dan penawarnya ada dua perusahaan yang telah sampai di Jakarta," kata Staf Hupmas Pertamina Unit Pemasaran II Palembang Roberth di Palembang, beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan pemenuhan paket tersebut, bulan Juni ini juga akan dimulai konversi gas elpiji untuk tahap III. Adapun wilayah untuk konversi gas tahap III di kota Palembang adalah daerah Gandus, Kalidoni, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II dan Sematang Borang.

Saat ini, wilayah yang sudah menjalankan program mencapai 95.000 paket dimana untuk tahap I sebanyak 50 ribu, tahap II sebanyak 45 ribu dan tahap III rencananya 100.000 paket konversi.

"Target kita sebanyak 200.000 paket, tetapi sisa yang 5.000 paket untuk koreksi tahap I, tahap II dan tahap III nanti, seperti mereka yang seharusnya dapat tetapi tidak tercah, jadi kita salurkan itu," ujarnya.

Sementara mengenai tabung gas isi 12 kg, dia menyatakan, kalau tabung gas itu untuk rumah tangga, tetapi saat ini pengusaha seperti rumah makan dan restoran banyak yang menggunakan itu sehingga rumah tangga kesulitan memperolehnya.

Jumlah pelanggannya banyak, karena satu tabung itu hitungannya keluarga dan kebutuhannya rata-rata 138 ton per hari untuk tabung isi 12 kg dan setiap bulannya jumlah tabung yang didistribusikan sebanyak 291.000 tabung.

"Stok gas elpiji di daerah ini aman, karena selain didatangkan dari luar, produksi di Pertamina Unit Pengolahan III bisa mencapai 300 sampai 350 metrik ton per hari, sedangkan kebutuhan 250 metrik ton per hari, jadi masih surplus," katanya. (A Choir/Ant)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **13** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : **A.8**

TAHUN 2008

Warga Protes Distribusi Gas Konversi Macet

SERANG — Puluhan warga dan mahasiswa memprotes Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development sebagai distributor kompor dan tabung gas konversi minyak tanah di Banten. Menurut warga, PT Banten tidak melaksanakan tugas mendistribusikan kompor gas gratis itu dengan baik.

"Dari target 700 ribu paket kompor gas, yang direalisasi hanya 120 ribu," ujar Syamsudin, koordinator aksi di kantor Gubernur Banten kemarin. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT Banten Ade Hanafi ketika dihubungi tak mengangkat telepon selulernya.

● MABSUTI IBNU MARHAS

42

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 74

TAHUN 2008

Polri amankan objek vital migas

JAKARTA: BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) bekerja sama dengan Polri untuk mengamankan objek vital minyak dan gas di seluruh Indonesia, dalam rangka peningkatan produksi migas.

Kepala BP Migas R. Priyono menuturkan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama ini merupakan kelanjutan kerja sama yang dilakukan sejak lima tahun sebelumnya.

"Kerja sama ini dijalankan secara efektif di 17 daerah penghasil migas di Indonesia. Pengamanan objek vital ini dilakukan baik pada wilayah *onshore* maupun *offshore*," ujarnya di Jakarta kemarin. (BISNIS/DLE)

44

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 22

TAHUN 2008

Kontraktor Beli Solar Subsidi di SPBU

Kalangan kontraktor di Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditengarai telah melakukan penyimpangan, yakni membeli bahan bakar bersubsidi untuk kegiatan perusahaannya. Padahal, bahan bakar sektor industri seharusnya bukan yang bersubsidi. Sinyalemen itu bersumber dari Depot Pertamina setempat yang mencatat hanya PLN yang membeli BBM sektor industri. "Sejak ditugaskan di Ende, per Desember 2007, saya melihat ada kejanggalan ketika mengecek daftar pembelian BBM sektor industri. Terlihat hanya PLN yang membeli BBM sektor industri. Itu tak mungkin sebab kegiatan proyek di wilayah Ende juga banyak," kata Kepala Depot Pertamina Kabupaten Ende Wawan Gunawan, Kamis (12/6) di Ende. Menurut dia, semua perusahaan kontraktor dalam pengerjaan proyek harus menggunakan BBM sektor industri yang saat ini Rp 10.906,5 untuk per liter solar. (SEM)

45

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

KKKS MIGAS

Pajak Tambahan Harus Diterapkan

JAKARTA (Suara Karya): Komisi VII DPR mendukung rencana pemerintah menerapkan pajak keuntungan tambahan (windfall profit tax) terhadap para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sektor minyak dan gas (migas). Apalagi para KKKS menikmati penghasilan berlipat menyusul tingginya harga minyak sekarang ini.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (12/6) mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. "Kami telah meminta pemerintah menerapkan pajak progresif atau *windfall profit tax* sebagai kompensasi kenaikan harga minyak," katanya.

Menurut Airlangga, pemerintah dapat menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kebijakan baru tersebut. "Aturan perpajakan di bidang migas sudah tercan-

tum dalam kontrak kerja sama. Sehingga format yang memungkinkan mengatur kebijakan baru itu adalah berbentuk perpres (peraturan presiden)," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, meski terlambat, namun dirinya mendukung rencana pemerintah tersebut. Seharusnya pemerintah telah menerapkan kebijakan tersebut sejak 2005, di mana saat itu harga minyak mulai merangkak naik. "Pemerintah lamban mengambil kebijakan ini. Kenaikan harga

minyak dunia sudah sedemikian nyata sejak 2005, tapi baru sekarang pemerintah mulai melangkah," katanya.

Menurut dia, negara sudah terlanjur menderita kerugian akibat kehilangan potensi penerimaan yang besar. Ini karena pajak tambahan tersebut tidak diterapkan sejak dulu. Seandainya langkah tersebut diambil sejak akhir 2007, maka bisa saja kenaikan harga BBM masih bisa dihindari.

Alvin menambahkan, besaran pajak tambahan mesti progresif, artinya semakin tinggi keuntungan, maka semakin besar pula besar pajaknya. "Pajak secara progresif cukup adil, karena biaya eksploitasi dan eksplorasi migas tetap. Sedangkan pendapatan kontraktor naik. Namun demikian, pemerintah juga

harus memberikan jaminan keringanan pajak kepada kontraktor jika dikemudian hari harga minyak turun.

Selain pajak tambahan, lanjutnya, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi migas, khususnya lapangan-lapangan yang sudah tua. "Jangan terlalu fokus memungut pajak tambahan. Namun malah membuat kontraktor tidak semangat naikkan produksi minyak," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuannya dengan kontraktor migas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perusahaan migas mau berbagi penderitaan. Ini menyusul kesulitan ekonomi akibat tingginya harga minyak dunia. Salah satu bentuk berbagi penderitaan tersebut adalah penerapan *windfall profit tax*. (A Choir)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Total Indonesia Komitmen Pasok Gas untuk PGN

JAKARTA (SINDO)—Perusahaan minyak asal Prancis, Total Indonesia, berkomitmen memasok gas alam cair (*Liquid Natural Gas/LNG*) untuk terminal penerimaan (*receiving terminal*) milik PT Perusahaan Gas negara (PGN) di Cilegon, Banten. Kontrak pengadaan LNG tersebut rencananya akan dilakukan pada Juli mendatang.

Direktur Pengembangan PGN Michael Baskoro mengatakan, persoalan ini tengah dalam pembicaraan antara pihak PGN, Total Indonesia, dan BP Migas. "Adapun besaran gas yang akan dipasok 1,5 juta metrik ton per tahun," kata dia di Jakarta kemarin.

Saat ini, *receiving terminal* PGN masih dalam pengerjaan konsorsium PGN, Pertamina, dan PLN. Namun, imbuh dia, ketersediaan alokasi gas untuk proyek LNG *receiving terminal* sangat terbatas. Meski begitu, PGN belum berencana untuk mengimpor LNG dari Qatar karena akan mengembangkan potensi domestik terlebih dulu. **(ferial thalib)**

47

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Menkeu G8 Bahas Harga Minyak dan Pangan

NERACA

Osaka - Negara-negara industri terkemuka dunia dijadwalkan akan membahas harga minyak yang melonjak pada pertemuan menteri-menteri keuangan (Menkeu) Kelompok Delapan (G8) yang dimulai Jumat (13/6).

Meroketnya harga bahan bakar dan pangan, yang menyulut kekhawatiran melonjaknya inflasi, akan mendominasi pembicaraan G8 yang diselenggarakan di Osaka, dengan perubahan iklim dan pembangunan menjadi masalah penting, ketika para menkeu kelompok itu akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pasar minyak dunia.

Deputi Menkeu Jerman Thomas Mirow, yang mewakili negaranya dalam pertemuan itu, mengatakan ia dan mitranya akan bergerak

"untuk mengendalikan" harga minyak yang pada pekan lalu melonjak hingga tertinggi sepanjang sejarah hampir 140 dolar AS per barel.

"Peningkatan dalam transparansi (harga minyak) diperlukan sekali," kata Mirow, seperti dikutip *DPA*.

Komentar Mirow itu juga digemakan oleh sejumlah mitra G8-nya. Wakil Menkeu AS H. McCormack mengatakan Selasa bahwa para menteri kemungkinan akan fokus pada kebijakan jangka menengah dan panjang, dengan mencoba mempengaruhi permintaan dan pasokan, termasuk mengembangkan sumber-sumber bahan bakar alternatif.

Namun, tuan rumah konferensi, Menkeu Jepang Fukushima Nukaga menyatakan pada pekan lalu bahwa G8 kemungkinan tidak bisa menghasilkan langkah-langkah segera untuk mengurangi harga minyak.

Pertemuan Osaka itu, yang diselenggarakan sebelum konferensi tingkat tinggi G8 di pulau Hokkaido pada Juli, akan dihadiri oleh para menkeu delapan perekonomian terbesar dunia, AS, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Italia dan Rusia, serta mitra-mitra mereka dari China, Korea Selatan, Indonesia, Australia dan Thailand.

Sejumlah anggota G8 mengindikasikan dukungan untuk rencana aksi guna membendung peningkatan harga minyak yang dipimpin oleh Presiden Prancis Nicholas Sarkozy, yang sedang meletakkan penekanan ekstra dalam peningkatan efisiensi energi.

Berkaitan dengan harga pangan yang tinggi, pembicaraan itu akan mengkaji kembali kemajuan yang dihasilkan dalam pertemuan bantuan kemanusiaan darurat.

W

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

DIY Belum Tetapkan HET Minyak

NERACA

Yogyakarta - Sebagian pangkalan minyak tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY, sehingga mereka masih menjual dengan harga yang dibuat agen.

Menurut Ny Martinah, pe-

milik pangkalan minyak tanah di Jalan Solo Km 10 Kalasan, Kabupaten Sleman, dirinya hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi HET yang sudah dikeluarkan pemprov DIY terkait harga penjualan minyak tanah di tingkat pengecer.

"Kami menjual minyak tanah dengan menyesuaikan harga dari agen yakni Rp3.100 per liter," katanya kepada *Antara*, Kamis.

Ia mengatakan saat ini per-

tiga drum minyak tanah masing-masing isi 200 liter harganya Rp1.665.000. Kemudian di tingkat pengecer harga itu disesuaikan tetapi tetap mengacu dari ketentuan agen.

"Meskipun harga sudah naik, tetapi ternyata tidak berpengaruh terhadap pasokan. Dalam seminggu kami hanya dijatah tiga drum, itupun kami masih diwajibkan menjual gas berupa tabung isi 3 kg. Kalau tidak menyediakannya tidak akan dipasok minyak ta-

nah," katanya.

Menurut dia, saat ini permintaan minyak tanah masih tinggi, sedangkan permintaan gas belum begitu ramai. Dalam satu pekan penjualan gas maksimal hanya lima tabung.

Hal yang sama disampaikan oleh Gunadi, pemilik pangkalan minyak tanah di jalan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, yang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi tentang HET minyak tanah.

Menurut dia, minyak tanah eceran baik yang dijual kepada rumah tangga maupun pedagang eceran, dipatok dengan harga sama yakni per liter Rp3.100 atau sesuai dengan ketentuan agen.

Selama ini pihak agen menyatakan pemberitahuan HET resmi minyak tanah belum ada, dan menyarankan untuk menjual eceran dengan harga Rp3.100 per liter, katanya. ●

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI **JUN** JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 **13** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

BPK Siap Audit Investigasi Penerimaan Migas

Jakarta, Probisnis RM.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersedia melakukan audit khusus atau investigasi jika diminta secara resmi oleh DPR. Audit tersebut terkait dengan audit umum atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007 yang di antaranya menemukan penerimaan minyak dan gas (migas) tidak seluruhnya dicatat dan dilaporkan dalam APBN.

"Kami siap saja melakukan audit investigasi. Kalau ada permintaan dari DPR, kita akan layani. Hasilnya nanti kita sampaikan kepada DPR," kata Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharudin di Jakarta, kemarin.

Departemen Keuangan (Depkeu) menganut asas netto dalam mencatat penerimaan migas. Dengan begitu, penerimaan migas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditaruh dulu di rekening antara (escrow account) atau disebut rekening 600. Setelah dikurangi pengeluaran yang bukan menjadi hak pemerintah pusat, baru dimasukkan ke kas negara atau lebih dikenal dengan sebutan rekening 502.

Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Soekoyo mengatakan, boleh-boleh saja pemerintah berpendapat bahwa penempatan di rekening 600 merupakan hal yang benar. Namun, BPK tetap menilai tidak benar karena berpegang pada Undang-Undang (UU).

Menurutnya, dalam UU Perbendaharaan Negara jelas disebutkan setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus dicatatkan dalam APBN. "Karena itu, harus disetorkan semuanya dulu," kata Soekoyo.

BPK kali pertama mengungkapkan ketidaktransparanan penerimaan migas dalam penyampaian hasil pemeriksaan atas LKPP 2007 di depan Sidang Paripurna DPR Selasa (3/6) pekan lalu. Kepala BPK Anwar Nasution mengatakan, penerimaan migas dicatat terlebih dahulu pada rekening di luar kas negara.

Pencatatan di luar kas negara tersebut kemudian sebagiannya disetorkan ke rekening kas negara dengan target APBN. "Sebagian lainnya digunakan langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBN," kata Anwar.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sistem akuntansi dengan pembukuan penerimaan migas netto sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Meski BPK menganggap tidak sesuai, hal tersebut sudah dikaji Komite Standar Akuntansi Pemerintah. "Komite mengatakan kami betul. Dalam artian, pembukuan penerimaan migas yang dilakukan pemerintah sesuai SAP," kata Menkeu.

Dia mengatakan, sistem penerimaan migas secara netto dilakukan dengan alasan yang jelas. "Jadi bukan seperti kayaknya ada skandal, kan tidak," kata Menkeu. Dia meminta BPK dengan

pemerintah saling menghormati pendapat.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan Depkeu Hekinus Manao mengatakan, terlalu berlebihan jika BPK menganggap pencatatan penerimaan migas tidak transparan. Sebab, pemerintah telah menyajikan mutasi transaksi dalam catatan LKPP 2007.

Hekinus menjabarkan, dalam catatan LKPP 2007 disebutkan, total penerimaan yang masuk ke rekening 600 pada 2007 mencapai Rp 126,207 triliun. Dari pemasukan tersebut, yang masuk ke APBN (rekening 502) di antaranya, PPh migas, PPh gas alam, pendapatan minyak bumi, pendapatan gas alam, pendapatan migas lainnya, dan pendapatan bunga penagihan PPh non migas yang totalnya Rp 76,299 triliun.

Dari rekening 600, ada pula yang masuk dalam bagian pemda. Di antaranya, bagi hasil PBB migas ke pemda Rp 17,997 triliun, dan pajak penerangan jalan non PLN Rp 70,637 miliar. Selain itu, masih ada yang harus dikeluarkan untuk jatah KKKS. Yakni, reimbursement PPN ke kontraktor Rp 4,183 triliun, pembayaran DMO (kewajiban memasok pasar domestik) fee KKKS Rp 3,221 triliun, pembayaran fee penjualan dan BP Migas Rp 567,525 miliar, dan pembayaran under-lifting KKKS Rp 252,702 miliar. ■ FIK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

AUDIT BPK

Penerimaan Migas Rp 32,25 Triliun Tidak Disetor

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kegagalan penerimaan keuangan negara di sektor migas pada 2007. Dana senilai US\$ 3,38 miliar atau Rp 32,25 triliun dari rekening nomor 600.000.411 milik Departemen Keuangan tidak langsung disetor sebagai penerimaan negara.

Tahun lalu, negara hanya menerima pendapatan dari sektor migas sebesar Rp 177,5 triliun. Dari rekening tersebut yang di setor hanya US\$ 11,68 juta atau Rp 108,8 miliar. "Kalau ada potongan di tengah jalan, seharusnya diubah dulu undang-undangnya dan dibuat aturan main yang jelas," kata Auditor Utama II BPK Syafri A Baharudin di Jakarta, Kamis (12/6).

Syafri mengatakan, seharusnya tidak ada rekening antara (*escrow account*) yang dibuat oleh Depkeu dan digunakan langsung oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

Penggunaan rekening antara tersebut seharusnya mendapat peng-

awasan, karena berpotensi mengurangi pendapatan negara.

Selama ini, BP Migas mengambil kebijakan sendiri untuk mengeluarkan dana tersebut, sehingga pencatatannya tidak transparan. BP Migas menggunakan dana tersebut untuk membiayai operasi *lifting*, pembayaran *fee domestic market obligation* (DMO), pembayaran kepada pemda, pajak, dan restribusi daerah.

Kepala BP Migas Raden Priyono mengatakan, rekening memang bukan milik BP Migas, melainkan rekening antara milik Depkeu, sebelum masuk rekening kas negara. "Dananya akan digunakan terlebih dahulu untuk pembayaram *fee* DMO, PPN *reimbursement*, PDRD, dan lainnya," kata Priyono kepada *Investor Daily* di Jakarta, kemarin.

Menurut Priyono, jika dana dari rekening antara langsung masuk ke kas negara, berarti sudah diakui sebagai penerimaan migas. Padahal, masih harus dikurangi faktor pengurang tersebut di atas.

Kepala Auditor BPK untuk BP Migas Wasito mengatakan, pihaknya punya persepsi berbeda dengan BP Migas terkait laporan keuangan tersebut. BPK menghendaki seluruh penerimaan migas langsung di setor ke rekening negara. Di sisi lain, BP Migas harus menampung dana tersebut untuk sementara, karena ada pengeluaran yang harus langsung dicairkan.

Sementara itu, tahun lalu pendapatan kotor (*gross revenue*) negara dari sektor migas US\$ 38,70 miliar atau setara Rp 359,97 triliun. Setelah dikurangi jatah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) US\$ 6,2 miliar atau Rp 57,7 triliun dan *cost recovery* US\$ 8,70 juta atau Rp 80,9 triliun, bagian negara tinggal tersisa US\$ 23,79 miliar atau Rp 221,2 triliun.

Menurut Syafri, bagian negara tersebut belum dipotong dengan piutang KKKS dan Pertamina yang masing-masing mencapai US\$ 802,34 juta (Rp 7,46 triliun) dan Rp 3,78 triliun. (c122/raj/her)

51

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

PERTEMUAN G-8

Negara Maju Tangani Harga Minyak

OSAKA (Suara Karya): Negara-negara industri terkemuka dunia dijadwalkan akan membahas cara menangani harga minyak yang melonjak pada pertemuan dua hari menteri-menteri keuangan (Menkeu) Kelompok Delapan (G8) yang dimulai hari ini.

Meroketnya harga bahan bakar dan pangan, yang menyulut kekhawatiran melonjaknya inflasi, akan mendominasi pembicaraan G8 yang diselenggarakan di Osaka, dengan perubahan iklim dan pembangunan menjadi masalah penting, ketika para menkeu kelompok itu akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pasar minyak dunia.

Deputi Menkeu Jerman, Thomas Mirow, yang mewakili negaranya dalam pertemuan itu, mengatakan ia dan mitranya akan bergerak "untuk mengendalikan" harga minyak yang pada pekan lalu melonjak hingga level tertinggi sepanjang sejarah, hampir 140 dolar AS per barel. "Peningkatan dalam transparansi (harga minyak) diperlukan sekali," kata Mirow.

Komentar Mirow itu juga digemakan oleh sejumlah mitra G8-nya. Wakil Menkeu AS H McCormack mengatakan, Selasa (10/6), bahwa para menteri kemungkinan akan berfokus pada kebijakan jangka menengah dan panjang, dengan mencoba memengaruhi permintaan dan pasokan, termasuk mengembangkan sumber-sumber bahan bakar alternatif.

Namun, tuan rumah konferensi, Menkeu Jepang Fukushima Nukaga, menyatakan pada pekan lalu bahwa G8 ada kemungkinan tidak bisa menghasilkan langkah-langkah segera untuk mengurangi harga minyak.

Pertemuan Osaka itu, yang diselenggarakan sebelum konferensi tingkat tinggi G8 di Pulau Hokkaido pada Juli, akan dihadiri oleh para menkeu delapan negara perekonomian terbesar dunia, AS,

Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada, Italia dan Rusia, serta mitra-mitra mereka dari China, Korea Selatan, Indonesia, Australia, dan Thailand.

Sejumlah anggota G8 mengindikasikan dukungan untuk rencana aksi guna membendung peningkatan harga minyak, yang dipimpin oleh Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, yang sedang meletakkan penekanan ekstra dalam peningkatan efisiensi energi.

Berkaitan dengan harga pangan yang tinggi, pembicaraan itu akan mengkaji kembali kemajuan yang dihasilkan dalam pertemuan bantuan kemanusiaan darurat, dan upaya untuk menjamin bahwa petani di negara-negara berkembang dapat meningkatkan akses untuk memperoleh bibit dan pupuk.

Tidak ada indikasi bahwa Rusia akan mendukung pendanaan yang direncanakan untuk mendukung upaya negara-negara miskin dalam rangka mengurangi biaya pangan yang meningkat.

Para menteri kemungkinan juga mendorong

pemerintah untuk menghapus hambatan ekspor pangan dan mengadakan upaya untuk menyelesaikan ambisi Kesepakatan Doha pada 2008, kata McCormack.

Di Osaka, G8 akan mengkaji kembali proses pembentukan Dana Teknologi Bersih, upaya yang didukung Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris untuk mengurangi pertumbuhan rumah kaca emisi gas yang sangat cepat di negara-negara berkembang dengan membantu menyebarkan teknologi energi bersih yang lebih murah, bukan alternatif yang lebih kotor.

Sejumlah anggota G8 lainnya diperkirakan akan menandatangani pendanaan tersebut.

Pembangunan, khususnya di Afrika, merupakan tema kunci yang lain dari kepemimpinan Jepang dalam G8. Jepang ingin memfokuskan diskusi mengenai bagaimana mendukung pembentukan infrastruktur inter-regional, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan upaya sendiri untuk memperkuat pasar modal lokal. (Kontos)

52

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Elpiji Ukuran 12 Kg Makin Langka Saja

Pertamina mengaku sudah tak sanggup memasok lonjakan tabung gas

Umar Idris

JAKARTA. Pasokan gas elpiji ukuran 12 kilogram di daerah masih langka. Akibatnya, harga jual terkerek. Keadaan ini terutama terjadi di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, di Bandarlampung, Lampung, serta di Sumatera Selatan dan di sebagian Pulau Kalimantan.

Ambil contoh, harga gas elpiji ukuran 12 kilogram di Pangkalpinang mencapai Rp 135.000 per tabung. Harga itu berlaku setelah pasokan gas dari Pertamina ke agen pengecer tersendat seminggu terakhir.

Pekan lalu, harga gas elpiji baru mencapai Rp 110.000 per tabung. "Gas elpiji habis karena setiap hari permintaan konsumen terus meningkat dan kami saat ini menunggu pasokan dari distributor," ujar Sasmita, seorang pengecer tabung dan gas

elpiji di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, kemarin (12/6) kepada Antara.

Sasmita memprediksi, jika pemerintah tidak mengatasi keadaan ini, harga gas akan terus melambung seperti harga tabung gas yang naik dari Rp 250.000 menjadi Rp 700.000 atau Rp 800.000 per tabung berat 12 kilogram. "Masak harga gas dalam sebulan terakhir naik tiga kali, kasihan masyarakat," ujarnya. Harga normal gas sebelum naik hanya Rp 65.000.

Dengan harga selangit terpaksa masyarakat mengurungkan niat untuk membeli gas dan sementara memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak. "Cara lain ialah membeli lauk di warung nasi," ujar Leni, ibu rumah tangga di Pangkalpinang.

Sementara di Bandarlampung, harga gas elpiji ukuran 12 kg adalah Rp 70.000. Harga tersebut naik dari keadaan normal

yang hanya Rp 57.000 per tabung. Selain itu, distributor di Bandarlampung membatasi pasokan gas kepada pengecer hanya 10 tabung seminggu. Padahal sebelumnya, pasokan dari distributor 10 tabung per hari.

Pertamina tidak dapat memenuhi kebutuhan tabung 12 kg sesuai permintaan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Pangkalpinang Anwar Effendi menyatakan, kelangkaan gas akibat pasokan tabung di Babel masih kurang. Seharusnya Pertamina memasok 17.000 tabung, tetapi tabung yang ada hanya

10.000 tabung. Jadi masih kurang 7.000 tabung. "Kami sudah meminta ke Pertamina di Medan," kata Anwar.

Pertamina angkat tangan

Di mata Pertamina, melambungnya harga gas maupun harga tabung gas elpiji ukuran 12 kg akibat beralihnya konsumen tabung gas ukuran 3 kg, dan konsumen tabung ukuran 50 kg ke tabung ukuran 12 kg. Akibatnya banyak konsumen gas elpiji memburu tabung maupun gas elpiji ukuran 12 kg. Tak heran bila harganya meningkat.

Untuk menambah pasokan tabung dalam jumlah banyak, Pertamina tak sanggup. Sebab harganya sangat mahal dan tak ada subsidi dari pemerintah. "Kami hanya sanggup menambah sekitar 800.000 tabung tiap tahun," kata Juru Bicara Pertamina, Wisnuntoro.

53

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

DPR Dukung Pajak Tambahan Minyak

Jakarta - Komisi VII DPR mendukung rencana pemerintah menerapkan pajak keuntungan tambahan (windfall profit tax) terhadap para kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas yang menikmati penghasilan berlipat menyusul tingginya harga minyak sekarang ini.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (12/6) mengatakan, dalam rapat dengan pemerintah, Komisi VII DPR telah meminta pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

"Kami telah meminta pemerintah menerapkan pajak progresif atau 'windfall profit tax' sebagai kompensasi kenaikan harga minyak," katanya.

Menurut dia, pemerintah dapat menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kebijakan baru tersebut.

"Aturan perpajakan di bidang migas sudah tercantum dalam kontrak kerja sama, sehingga format yang memungkinkan mengatur kebijakan baru itu adalah berbentuk perpres," katanya. Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie mengatakan, meski terlambat, namun dirinya mendukung rencana pemerintah tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah telah menerapkan kebijakan tersebut sejak 2005 saat harga minyak mulai merangkak naik.

"Pemerintah lamban mengambil kebijakan ini. Kenaikan harga minyak dunia sudah sedemikian nyata sejak 2005, tapi baru sekarang pemerintah mulai melangkah," katanya.

Menurut dia, negara sudah terlanjur menderita kerugian akibat kehilangan potensi penerimaan yang besar karena pajak tambahan tersebut tidak diterapkan sejak dulu.

Seandainya langkah tersebut diambil sejak akhir 2007, lanjutnya, maka bisa saja kenaikan harga BBM masih bisa dihindari. Alvin menambahkan, besaran pajak tambahan mesti progresif yang artinya makin tinggi keuntungan, makin besar pula besar pajaknya.

"Pajak secara progresif cukup adil karena biaya eksploitasinya tetap, sedangkan pendapatan kontraktor naik," katanya. Namun, lanjutnya, pemerintah juga harus memberikan jaminan keringanan pajak kepada kontraktor jika dikemudian hari harga minyak turun.

Alvin juga berharap, selain pajak tambahan, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi migas khususnya lapangan-lapangan yang sudah tua.

"Jangan terlalu fokus memungut pajak tambahan, namun malah membuat kontraktor tidak semangat naikkan produksi minyak," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuannya dengan kontraktor migas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perusahaan migas mau berbagi penderitaan menyusul kesulitan ekonomi akibat tingginya harga minyak dunia.

Salah satu bentuk berbagi penderitaan tersebut adalah penerapan "winfall profit tax." (ant)

54

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (2) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Perusahaan Minyak Diminta Tingkatkan Produksi

Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap para perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi di Indonesia, bisa melakukan *sharing the pain* atau berbagi rasa, di tengah kenaikan harga minyak yang semakin tinggi.

"Sebetulnya, permasalahan kita ada di subsidi, bagaimana kemudian perusahaan minyak itu juga ikut memikirkan untuk mendukung bagaimana *sharing the pain* dengan kita, istilahnya berbagi rasa, untuk bisa mendukung perekonomian nasional," kata Menteri ESDM Purnomo Yugiantoro se usai mengikuti pertemuan antara Presiden dengan sejumlah pimpinan perusahaan kontrak kerja sama (KKS) bidang hulu migas di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (11/6).

Presiden meminta agar menteri terkait, seperti Purnomo, Menkeu, Dirjen Pajak, dan BP Migas melakukan pembicaraan bersama dalam menentukan bentuk *sharing the pain* itu seperti apa.

Purnomo mengakui dalam *sharing the pain* ini ada beberapa

exercise yang bisa dilakukan, tapi harus dibicarakan dulu dengan Depkeu. Supaya para KKS ini memegang komitmen melakukan *sharing the pain*, Presiden meminta agar masalah perizinan semakin pendek di daerah, supaya tidak menghambat.

Purnomo mengungkapkan, dalam pertemuan itu hadir 37 KKS, di mana mereka akan melakukan optimalisasi produksi, teknologi sekunder tertier, dan rehabilitasi sumur-sumur tua. Pada saat ini, ada 99 badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Dari 99 itu, ditambah lagi saat Indonesian Petroleum Association ada 5 kontrak diteken, dan tahun ini akan ada tambahan 25 kontrak baru.

Kepala BP Migas Priyono menambahkan, pihaknya sudah menerima laporan bahwa ada 12 penemuan yang akan segera dikembangkan, antara lain di Natuna, Selat makasar, Sumsel, dan Ketapang yang dilakukan oleh perusahaan Genting Oil, Chevron, Conoco, dan Medco.

(dina sasti damayanti)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ PENERIMAAN MIGAS

BPK-Depkeu Berselisih Soal Rekening Migas

JAKARTA. Pencatatan pemerintah atas penerimaan minyak dan gas masih kacau. Gara-gara itu, Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum memiliki kata sepakat perihal pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak penghasilan (PPH) dari migas.

BPK menilai, PNBP dan PPh dari sektor migas seharusnya masuk ke dalam pos rekening 502. Sedangkan Departemen Keuangan memasukkan ke dalam rekening 600. "Kami hanya berpegang pada aturan yang ada," kata Auditor Utama BPK Soekoyo, kemarin (12/6).

Aturan yang dia maksud adalah pasal 16 Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Keuangan Negara. Rekening 502 merupakan rekening yang selama ini disebut sebagai kas negara. Meskipun isi rekening ini milik negara, Departemen Keuangan tidak bisa seenaknya menggunakan atau membelanjakannya.

Beda cerita jika dana masuk ke rekening 600, Departemen Keuangan bisa dengan mudah mengeluarkan uang itu. Ambil contoh, Depkeu bisa saja mengambilnya untuk untuk ongkos operasional Badan Pengatur Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Depkeu juga boleh mengambilnya untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk daerah.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007, PNBP dan PPh dari migas di rekening 502 mencapai Rp 99,2 triliun. Sedangkan dalam pos rekening 600 sebesar Rp 76,2 triliun. Adanya selisih pada

dua pos itu karena Departemen Keuangan langsung mengeluarkan dana dari pos rekening 600.

Apabila penerimaan PNBP dan PPh Migas ditampung ke dalam rekening 600, BPK yakin data penerimaan pemerintah lebih besar. Di samping itu, keluar masuknya uang dari rekening 600 membuat BPK curiga. "Pengambilan uang secara langsung berarti dana itu tidak dianggarkan," papar Soekoyo.

Perselisihan ini di mata panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bukan persoalan yang penting. Wakil Ketua Panitia Anggaran Suharso Monoarfa tidak mempersoalkan di rekening mana penerimaan negara dari PNBP dan PPh migas itu disimpan. "Mau disimpan di dua rekening sebenarnya tidak masalah asal jelas perhitungannya," ucap Suharso.

Suharso menilai perbedaan pandangan soal menyimpan uang dari PNBP dan PPh migas tidak akan mempengaruhi struktur anggaran pemerintah. Alasannya, dana itu tidak terlalu mempengaruhi ketersediaan uang di kas negara.

Suharso lebih setuju pemerintah segera membahas pembentukan komisi baru di DPR yang membidangi urusan akuntan publik. "Agar kasus seperti ini tidak berlanjut," kata Suharso.

Usulan yang berasal dari BPK itu telah ada dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR. Belum jelas bagaimana tanggapan Departemen Keuangan terhadap usulan parlemen tersebut.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MAMIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2008

**Pertemuan Minyak
Dijadwalkan 22 Juni**

■ **PARIS**-Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan negara produsen dan konsumen minyak 22 Juni mendatang, kata Sekjen Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Abdalla El-Badri, Rabu (11/6). "Pertemuan itu akan mengambil tempat di Jeddah pada 22 Juni mendatang," kata El-Badri melalui telepon. Ia menambahkan para pejabat dari negara-negara konsumen, Lembaga Energi Internasional dan juga para pimpinan bank-bank investasi Morgan Stanley dan Goldman Sachs akan diundang. Raja minyak Arab Saudi menyerukan bahwa pembicaraan antara negara produsen dan konsumen itu nanti hendaknya difokuskan pada masalah pasar minyak.

Dari Washington, Amerika Serikat menyatakan akan turut ambil bagian dalam pertemuan itu "Sebagai salah satu dari negara produsen dan konsumen terbesar dunia, kami akan ikut berpartisipasi," kata juru bicara Gedung Putih Tony Fratto, Selasa (Rabu WIB). (ant/afp)

57

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Harga Minyak Naik, Indonesia Kok Malah Tekor

Oleh
NOVAN DWI PUTRANTO

JAKARTA - Harga minyak dunia tahun ini masih mencemaskan bagi negara-negara konsumen minyak, termasuk Indonesia. Harga minyak yang sempat menyentuh US\$ 139 per barel juga membuat Arab Saudi sebagai pemilik cadangan minyak terbesar dunia khawatir.

Di Amerika Serikat, meroketnya harga minyak dunia turut mendongkrak harga bahan bakar minyak. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara di belahan dunia dan terakhir Malaysia yang menaikkan harga BBM hingga 42 persen.

Di Indonesia, meski harga BBM sudah dinaikkan dengan rata-rata 28,7 persen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 diperkirakan masih akan tertekan hingga akhir tahun.

Hal tersebut dikarenakan angka *lifting* minyak yang diperkirakan tidak akan bergerak jauh dari target sebesar 927.000 barel per hari. Beban subsidi energi terus merang-

kak naik seiring kenaikan harga minyak dunia. Dengan kata lain, harga BBM bisa naik dalam satu tahun ini jika harga minyak dunia terus meroket.

Pengamat perminyakan Kurtubi menjelaskan kenaikan harga BBM hanya mampu menanggung beban subsidi dalam jangka pendek. "Masih ada enam bulan ke depan dan harga minyak diperkirakan akan terus menguat," katanya. Dalam APBN 2008, subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 75,6 triliun. Setelah melihat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah menaikkan subsidi energi menjadi Rp 187,1 triliun pada APBN-P 2008.

Pembengkakan subsidi tersebut terjadi saat harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) melewati batas asumsi dalam APBN-P 2008 sebesar US\$ 95 per barel. Dengan pergerakan harga minyak dunia yang cepat, ICP juga ikut merangkak naik. Hingga 20 Mei 2008 atau satu minggu sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, rata-rata ICP sudah menembus

US\$ 104,03 per barel. Akhir Mei 2008, ICP sudah menembus level US\$ 121 per barel.

Kenaikan harga BBM hanya solusi jangka pendek untuk mengamankan anggaran yang terus membengkak seiring kenaikan harga

minyak dunia. Meski menikmati *windfall profit* dari kenaikan tersebut, pemerintah masih tekor Rp 500 miliar dari setiap kenaikan US\$ 1 per barel. Aneh bin ajaib memang, tetapi itulah yang terjadi di tengah pesta pora

negara-negara produsen minyak dengan kenaikan yang sangat tinggi.

Naikkan Produksi

Kurtubi mengakui upaya menaikkan *lifting* minyak merupakan hal yang musta-

hil dilakukan dalam waktu dekat. "Kita butuh temuan lapangan-lapangan baru dan itu butuh waktu," katanya. Ia mengatakan kondisi saat ini sangat berbeda dengan produksi minyak sebelum tahun 2000.

Sebelum tahun 2000, pemerintah masih mampu mengatasi pembengkakan subsidi energi karena *lifting* harian berada di level US\$ 1,6 juta barel per hari.

Namun dengan makin tuanya lapangan minyak Indonesia, angka *lifting* terus menurun bahkan berada di bawah 1 juta barel per hari. "Kalau *lifting* kita bisa 1,4 juta barel pemerintah tidak perlu repot," katanya.

Laporan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas bumi (BP Migas) menyebutkan penurunan produksi lapangan tua mencapai 20 persen per tahun. Kepala BP Migas R. Priyono mengatakan pihaknya akan mengupayakan untuk menjaga penurunan produksi di kisaran 10-15 persen. Dengan produksi yang terus menurun dan diperparah dengan konsumsi yang terus meningkat, pemerintah tidak banyak opsi untuk mengamankan anggaran jangka pendek.

Ia juga mengatakan pihaknya akan berupaya meningkatkan *lifting* minyak agar mampu melewati target yang ditetapkan APBN P 2008 sebesar 927.000 barel per hari. "Kita akan bentuk task force untuk mencapai ini," katanya. Upaya lain yang akan dilakukan adalah mendorong kontraktor untuk

mengoperasikan kembali sumur tua dan lapangan idle yang selama ini diabaikan karena tidak ekonomis. "Dengan harga minyak seperti sekarang tentu alasan itu tidak ada lagi," katanya.

Turunkan Asumsi

Dalam pembahasan asumsi harga minyak antara Komisi VII DPR dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah masih berani menyodorkan asumsi di kisaran US\$ 95-110 per barel. Meski faktanya harga minyak sudah menembus level US\$ 135 per barel, pemerintah yakin pada tahun 2009 harga minyak lebih stabil.

Gubernur OPEC Maizar Rachman menjelaskan setidaknya ada 9 faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga minyak dunia pada tahun 2009 nanti. Di antaranya yang paling berpengaruh adalah faktor perdagangan berjangka. Faktor ini menjadi momok kenaikan harga minyak dunia sejak Agustus tahun 2007 hingga sekarang.

"Dari Agustus hingga sekarang adalah yang paling berpengaruh adalah perdagangan berjangka, dimana harga naik dari US\$ 70 sampai US\$ 135 per barel," katanya. Faktor lain yang mempengaruhi harga minyak adalah *supply and demand*.

Maizar memperkirakan permintaan minyak dunia akan turun pada tahun depan akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang moderat.

Selain itu, dengan suplai dari negara-negara OPEC yang diperkirakan tetap sebesar 32 juta barel per hari akan berdampak pada stabilnya harga. "Suplai non-OPEC sejak minyak naik sejak tahun 2004 mulai meningkat walaupun tidak signifikan kita harapkan tahun 2009 akan meningkat lagi, ini akan melonggarkan supply demand sehingga bisa membuat harga turun," paparnya.

Kapasitas cadangan negara OPEC yang diperkirakan mencapai 4 juta barel per hari juga akan mampu menekan harga minyak yang sudah meroket.

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga minyak antara lain nilai tukar dollar Amerika Serikat. Jika nilai dolar AS terus menurun, spekulasi terhadap minyak akan makin menguat. Namun, Maizar memperkirakan nilai tukar dolar AS tahun mendatang lebih stabil hingga akan turut memberi sumbangan dalam menekan harga minyak dunia. Selain itu, ketegangan politik di Timur Tengah juga akan mampu memberi pengaruh terhadap harga minyak meski tidak terlalu signifikan. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 37

TAHUN 2008

Cemas Menanti Keluarnya Senjata Pamungkas itu

Pemerintah yakin APBN masih aman meski harga minyak mentah dunia US\$ 150 per barel

Harga minyak dunia kembali melonjak tinggi. Tapi, pemerintah belum terlalu khawatir lantaran memiliki bantalan pengaman APBN. Cuma, jika harga minyak terus naik, harga BBM bersubsidi bisa kembali naik.

S.S. Kurniawan, Ali Imron H.,
Hans Henricus B.

Harga minyak mentah dunia kembali mengganas. Setelah sempat jinak dengan bermain-main di bawah US\$ 128 per barel, pada perdagangan di New York Mercantile Exchange alias NYMEX, Jumat (6/6) pekan lalu, banderol emas hitam balik menggila. Bahkan mengukir rekor tertinggi.

Papan skor di NYMEX menunjukkan harga minyak *light sweet* di angka US\$ 138,54 sebarel. Itu artinya, melonjak lebih dari US\$ 10 ketimbang transaksi hari sebelumnya yang ditutup pada level US\$ 127,79 per barel. Tapi, lalu beringsut turun dan sampai Kamis siang (12/6) harga minyak mentah di pasar Singapura sudah turun ke kisaran US\$ 135 per barel.

Lonjakan banderol si emas hitam ini salah satunya buntut reaksi pasar atas prediksi Ole Slorer. Analisis asal Morgan Stanley tersebut bilang harga minyak dunia bisa menyentuh US\$ 150 sebarel bulan depan.

Harga minyak bumi yang kini bermain-main di atas US\$ 130 per barel itu membawa kecemasan baru. Jangan-jangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 jebol atau harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan naik kembali. Maklum, dalam anggaran, asumsi harga minyak hanya US\$ 95 se barel.

Tapi, pemerintah menyatakan kenaikan harga minyak dunia yang drastis itu belum terlalu mengkhawatirkan. Sekali pun harga minyak bumi menembus US\$ 150 per barel sesuai prediksi Slorer, APBN kita masih aman.

Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Syahril Loetan bilang, pemerintah punya duit bantalan pengaman APBN sebesar Rp 18,3 triliun. "Ini masih memungkinkan kami mentoleransi harga minyak dunia sampai US\$ 150 per barel," tandas dia.

Dengan adanya bantalan pengaman itu, keuangan negara juga masih memberikan ruang kenaikan volume konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tahun ini hingga 37 juta kiloliter. Dalam APBNP 2008, pemakaian bensin dan kawan-kawannya dipatok pada 35,5 juta kiloliter.

Cuma, perlu dicatat, uang pengaman ini hanya sanggup bertahan

Setiap harga minyak naik sebesar US\$ 1, pendapatan memang naik Rp 3,3 triliun, tapi subsidi BBM pun membengkak Rp 6,7 triliun.

selama satu bulan ketika harga minyak dunia terus menari di level US\$ 150 per barel. "Kalau sudah lebih dari itu: habis," ungkap Syahril, "Pemerintah tak boleh terlalu lama mengambil tindakan karena itu sudah ada di titik kritis."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah masih bisa menahan beban subsidi selama harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau *Indonesia crude price* (ICP) sepanjang tahun ini belum melampaui US\$ 110 per barel. "Kalau sudah lewat, baru kami akan menghitung ulang," kata dia.

Data yang digenggam Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, ICP sepanjang Mei lalu sudah mencapai US\$ 124,67 per barel atau naik US\$ 15,36 dibanding dengan bulan sebelumnya. Cuma, rata-rata selama lima bulan pertama 2008 baru US\$ 104,76 per barel.

Namun, bukan berarti pemerintah tak ketar-ketir melihat harga minyak dunia yang makin liar. "Kalau sampai akhir tahun harga minyak dunia tidak turun menjadi US\$ 120 per barel, defisit bisa melesat ke 2%," kata Ani, panggilan

lalu, lubang defisit menganga hingga Rp 94,5 triliun alias 2,1%. Sebab, subsidi BBM dan listrik membengkak menjadi Rp 200,6 triliun. Tapi, sekarang menciut tinggal 1,8% atau Rp 82,3 triliun.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Aziz membeberkan, setiap harga minyak versi Indonesia naik US\$ 1, pemerintah mendapat pemasukan Rp 3,3 triliun. Tapi, negara mesti merogoh kantong buat subsidi energi sebanyak Rp 6,7 triliun. "Dananya dari mana?" ujar dia.

Semestinya, menurut Harry, kekurangan duit subsidi sebesar Rp 3,4 triliun menjadi tanggungan masyarakat. Sebab, satu-satunya cara mengamankan APBN tahun ini adalah mendongkrak kembali harga BBM. Tapi, itu tentu jika ICP melewati US\$ 110, dan dana bantalan pengaman sudah ludes.

Harry menyatakan, pemerintah tak perlu cemas apalagi takut mengambil kebijakan yang tidak populer tersebut. Pasalnya, Sena-

yan, tempat para wakil rakyat bermarkas, sudah memberi restu lewat Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16/2008 tentang APBN Perubahan 2008.

Bunyinya, pemerintah berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia berada di atas US\$ 100 per barel. Jadi, "Pemerintah punya senjata pamungkas kalau perlu dana tambahan, tak ada jalan lain, harga BBM harus naik," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Cuma, kata Syahrial, pemerintah masih punya langkah pengamanan lain sebelum sampai pada keputusan kembali mengerek harga BBM untuk yang kedua kalinya di tahun ini. Caranya, mengungkit produksi minyak dan mengerem konsumsi BBM. Tapi, "Kalau tak sanggup lagi, ya, harus menaikkan harga BBM," ujar dia.

Tapi, harga baru untuk bensin dan rekan-rekannya itu nantinya tidak boleh langsung sesuai ban-

derol internasional. Jadi, harus naik bertahap. Syahrial menyebut pemerintah harus menggiring harga BBM secara perlahan ke hitungan ekonomis. Bila APBN tak lagi defisit, baru kembali ke pola subsidi seperti sekarang.

Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom Danareksa Research Institute, mengatakan ketika harga minyak dunia betul-betul sudah menembus US\$ 150 sebarel, pilihan pemerintah hanya dua: menaikkan subsidi atau banderol BBM. Tapi, jika mengacu pada perhitungan Lembaga Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), secara fundamental harga minyak saat ini cuma US\$ 114 sebarel. Jadi, "Masih cukup aman," ujar dia.

Sekarang yang harus dijaga, Purbaya menambahkan, bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tak boleh naik lagi. Kalau bank sentral nekat menaikkan, maka akan terjadi perlambatan ekonomi. Apalagi, jika melewati dua digit, roda ekonomi bisa mogok. □

Amukan si Tahi Setan ke Mana-Mana

Bukan cuma Indonesia doang yang pusing menghadapi harga minyak mentah dunia yang bergerak liar, ternyata, Jepang, Korea Selatan, dan India juga sama puyengnya. "Pertumbuhan ekonomi bakal melambat di seluruh Asia," kata Shane Oliver, Kepala Strategi Investasi AMP Capital Investors, kepada *Bloomberg*.

Pemerintah Korea Selatan, misalnya, sampai harus mengeluarkan paket bantuan tunai langsung buat warganya sebesar 10,5 triliun won atau US\$ 10 miliar. Negeri Ginseng itu juga memotong pajak penghasilan untuk 13 juta pekerja, kemudian memberi subsidi buat petani dan nelayan.

Ekonom Lehman Brothers Hol-

ding Inc Kwon Young Sun menyatakan, kebijakan yang diambil Pemerintahan Han Seung Soo tersebut menunjukkan begitu hebatnya dampak amukan banderol minyak mentah yang sering dijuluki si tahi setan itu. Tampaknya, "Negara-negara lain mesti mengikuti jejak Korea Selatan," ujar dia.

India memilih mengerek harga BBM guna menyelamatkan keuangan negara. "Sama persis dengan yang dilakukan Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Nepal. Perdana Menteri Manmohan Singh bilang kenaikan banderol BBM bulan ini tidak bisa dihindarkan lagi. "Kami tidak bisa menahan harga seperti dulu," tandas dia.

Adapun Jepang bersama-sama

negara-negara industri anggota Kelompok Delapan plus China, India, dan Korea Selatan membentuk Kerjasama Internasional untuk Efisiensi Energi. Maklum, Jepang, China, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat mengkonsumsi separo kebutuhan minyak dunia.

Banderol emas hitam yang meroket ditambah krisis kredit macet di sektor properti alias *subprime mortgage* yang melanda Negeri Abang Sam sudah memukul ekonomi dunia. "Saya sangat khawatir dengan masa depan ekonomi negara ini dan dunia," kata Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Jepang Hiroko Ota, dalam wawancara khusus dengan *Asahi TV*.

Jadi, mari puyeng rame-rame. □

Rupiah sempat terjungkal ke Rp 9.360 per US\$ ketika harga minyak melonjak hingga US\$ 139,12 per barel Jumat pekan lalu. Saking tingginya lonjakan itu, muncul pertanyaan: akankah ada kenaikan harga BBM yang selanjutnya? Soalnya, pemerintah hanya mematok asumsi minyak pada APBN sebesar US\$ 95 per barel.

Untunglah, minyak lalu melemah tipis ke US\$ 134,60 sebarel (11/6). "Pelemahan minyak sangat membantu rupiah dan mata uang regional bergerak lebih stabil," kata Fauzi Ihsan, ekonom Standard Chartered Bank. Hari itu, rupiah adem ayem di Rp 9.320 per US\$. Fauzi melihat kenaikan BI *rate* pekan lalu berhasil menjaga rupiah sehingga tak anjlok lebih dalam lagi. Tentu saja BI juga menjaga rupiah dengan intervensi pasar. "Saat ini bisa dibbilang intervensi BI terlihat cukup

Angin Baik yang Tak Kunjung Bertiup

besar," ucap Rosady T.A. Montol, Kepala Tresuri BNI.

Pekan depan ada kemungkinan rupiah masih akan bergerak stagnan di kisaran Rp 9.310-Rp 9.370. Cuma, ada potensi rupiah cenderung melemah. "Karena dolar di pasar sudah *oversold*, sehingga bisa *rebound* ke Rp 9.350," kata Rosady. Terlebih, dolar AS memang tengah menguat terdorong ekspektasi, The Fed berhenti menurunkan suku bunga.

Tidak seperti dolar, hingga kini pun belum ada angin segar

yang bisa membawa rupiah berbalik arah. Inflasi yang tinggi dan masalah subsidi BBM justru membuat kepercayaan investor terhadap perekonomian kita menipis. Tengoklah jumlah dana asing yang cabut dari Sertifikat Bank Indonesia.

Data BI menunjukkan, dana asing yang parkir di SBI Mei lalu tinggal US\$ 1,79 miliar, dari US\$ 3,06 miliar per awal tahun. Memang, sih, porsi asing di Surat Utang Negara (SUN) tumbuh. Bahkan di lelang SUN (10/6), penawaran asing mencapai Rp 7,007 triliun atau 90% dari total penawaran. Tapi, itu sebagian karena *yield* SUN cukup gurih, yakni 13,18%-13,85%. Itu pun tak mempengaruhi rupiah.

Rosady menghitung titik *resistance* rupiah ke dolar berada di Rp 9.380. Jika ini bisa ditembus, bukan tak mungkin rupiah akan melampaui Rp 9.400/US\$. Jangan sampai, dehl! □